

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Investasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, koefisien positif bermakna apabila investasi pemerintah meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat secara signifikan.
2. Investasi pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, artinya semakin tinggi investasi pemerintah tidak memberikan dampak yang besar pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja.
3. Investasi swasta berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, artinya semakin tinggi investasi swasta tidak memberikan dampak yang besar pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
4. Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, koefisien positif bermakna apabila investasi swasta meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat secara signifikan.
5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, koefisien positif bermakna apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat secara signifikan.
6. Disparitas pendapatan tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan adalah sama, baik pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan rendah ataupun pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan tinggi.
7. Disparitas pendapatan memoderasi pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan adalah berbeda pada

kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan rendah dan kabupaten dengan disparitas pendapatan tinggi. Koefisien moderasi bernilai positif menunjukkan disparitas pendapatan memperlemah pengaruh negatif penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, sehingga penyerapan tenaga kerja hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan yang rendah saja, sedangkan pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan yang tinggi, meningkatnya penyerapan tenaga kerja menjadi tidak berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kemiskinan.

7.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil studi mengenai pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, maka saran-saran penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi swasta cenderung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan variabel yang sangat kuat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, investasi pemerintah ini patut diprioritaskan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Perencanaan dan alokasi anggaran belanja modal sebagai investasi pemerintah harus tepat sasaran dalam mencapai tujuan pembangunan terutama dalam rangka pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah penduduk miskin.
3. Strategi mengurangi tingkat kemiskinan pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan harus dilakukan dengan cara memperbesar penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan realisasi investasi swasta, baik asing maupun domestik, untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Peningkatan investasi swasta akan dapat memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang pada gilirannya akan menurunkan angka kemiskinan.
4. Investasi swasta yang masuk ke kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan harus memperhatikan dan memberikan peluang angkatan kerja lokal

untuk terlibat untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

5. Investasi swasta diharapkan tidak harus selalu membawa tenaga kerja terampil dan siap pakai dari luar tetapi disarankan agar dapat membina tenaga kerja lokal yang terampil melalui pelatihan dan pemberdayaan peningkatan kemampuan.
6. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) melalui kebijakan menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan daerah, memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang serta mempermudah peraturan dalam berinvestasi sehingga dapat memperbesar lapangan kerja yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan.
7. Investasi pemerintah juga perlu lebih diarahkan untuk peningkatan investasi modal manusia (*human capital*) melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sebagai alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan.
8. Kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang mampu menarik investasi ke seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Bagi penelitian yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan literatur mengenai pengaruh dari investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, disparitas pendapatan, dan tingkat kemiskinan pada tingkat Kabupaten/Kota. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah variabel yang juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memprediksi tingkat kemiskinan, seperti variabel investasi Pemerintah Pusat (dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus fisik) yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini serta yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dengan harapan dapat lebih memperkaya isi dan cakupan penelitian, karena perkembangan teknologi saat ini mengubah struktur perekonomian, sehingga setiap daerah juga harus mengantisipasi perkembangan teknologi menjadi peluang yang baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbesar penyerapan tenaga kerja, sehingga diharapkan tingkat kemiskinan bisa menurun. Selanjutnya, disparitas pendapatan di sebuah wilayah juga patut diperhatikan karena terbukti penyerapan tenaga kerja hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada wilayah dengan disparitas pendapatan yang rendah, sedangkan pada wilayah dengan

disparitas pendapatan yang tinggi, pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan menjadi kecil.